

# **KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**



Oleh:

NAMA : YANWARINSON P SARAGIH  
NIM : 2002190031

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana  
Konsentrasi Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2022**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Yanwarinson Parulian Saragih  
NIM : 2002190031  
Program : Pasca Sarjana  
Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul : Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam  
Pembubaran Partai Politik di Indonesia

1. Dibuat dan di selesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yanwarinson Parulian Saragih



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Yanwarinson Parulian Saragih  
NIM : 2002190031  
Program : Pasca Sarjana  
Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 Juli 2022  
Menyetujui

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H

Pembimbing II

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H

Program Studi Hukum Magister  
Ketua

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Program Pasca Sarjana  
Direktur



Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

**Oleh**

**Nama : Yanwarinson Parulian Saragih**

**Nim : 2002190031**

**TESIS**

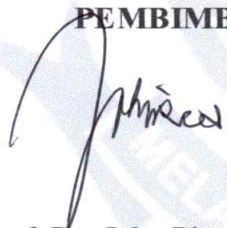
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Study Hukum Program Magister Program Pascasarjana

Konsentrasi Hukum: Ekonomi Bisnis

**Jakarta, 14 Juli 2022**

**PEMBIMBING I**



**(Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H)**


**PEMBIMBING II**



**(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H )**

Mengetahui,

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum UKI



**(Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.)**





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 14 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yanwarinson Parulian Saragih  
NIM : 2002190031  
Program : Pasca Sarjana  
Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda tangan
Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H	Ketua	
Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H	Penguji	
Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH	Penguji	

Jakarta, 14 Juli 2022

**Catatan:**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Nama : Yanwarinson Parulian Saragih  
NIM : 2002190031  
Program : Pasca Sarjana  
Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam Pembubaran  
Partai Politik di Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 14 Juli 2022



Yanwarinson Parulian Saragih

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberikan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Selama penyusunan tesis penulis telah banyak menerima dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terbatasnya kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman penulis, maka hal-hal tersebut sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Dr. Bintang Simbolon, M. Si atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
3. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H, selaku pembimbing pertama sekaligus sebagai dosen penguji pada Sidang Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H, selaku pembimbing kedua sekaligus sebagai dosen penguji pada Sidang Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia
6. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H selaku dosen penguji pada Sidang Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
7. Dosen-dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menjalani studi sehingga sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
8. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani studi pada Program

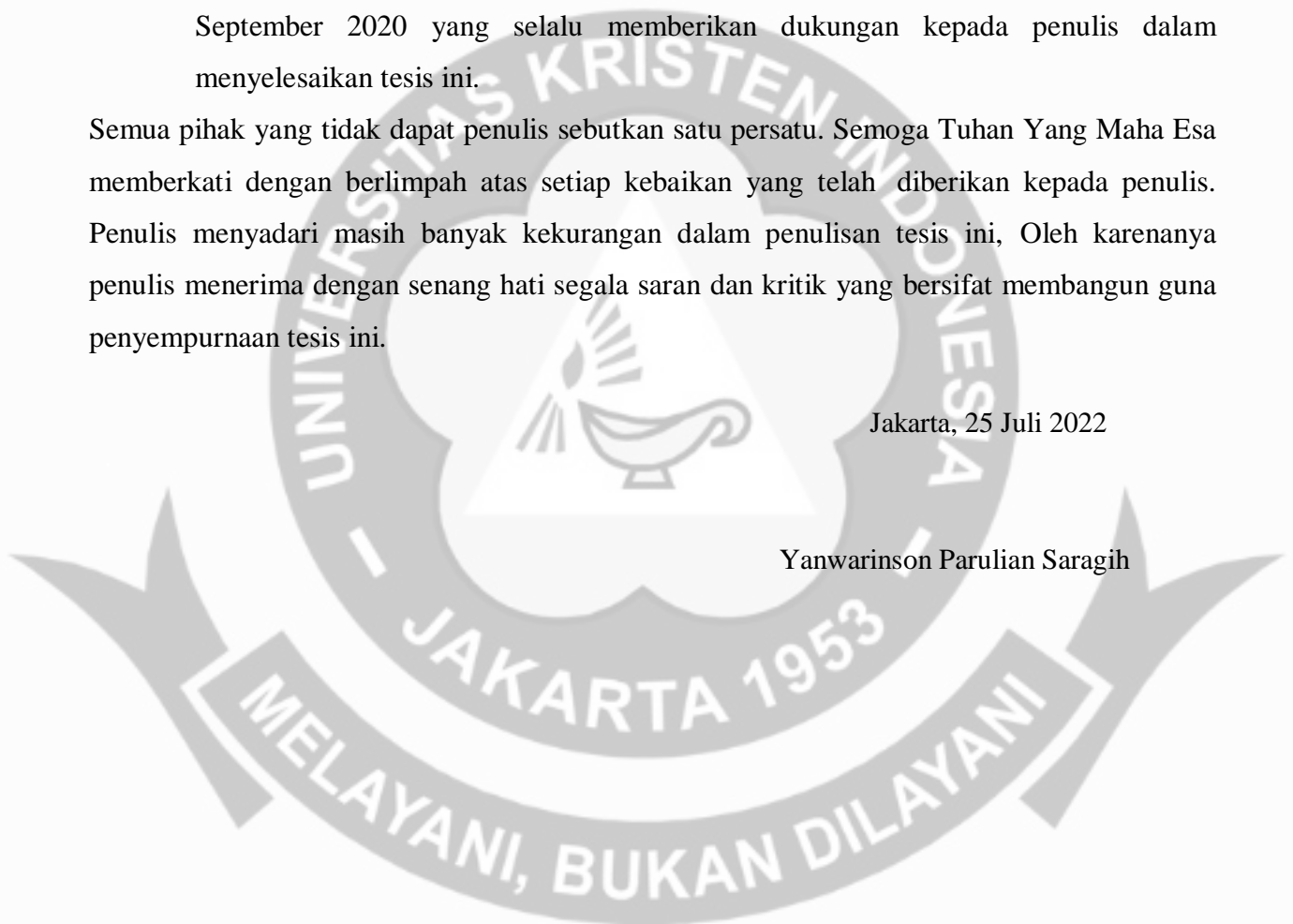
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

9. Staf Perpustakaan Pusat serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta yang telah memberikan bantuan dan informasi mengenai bahan-bahan bacaan selama penulis menjalani studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
10. Istri tercinta Anita MS, S.H., M.H. dan anaku tercinta Nadine Manuella Louise Saragih yang selalu memberikan support, kasih sayang dan cinta kepada penulis.
11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan September 2020 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dengan berlimpah atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, Oleh karenanya penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini.

Jakarta, 25 Juli 2022

Yanwarinson Parulian Saragih



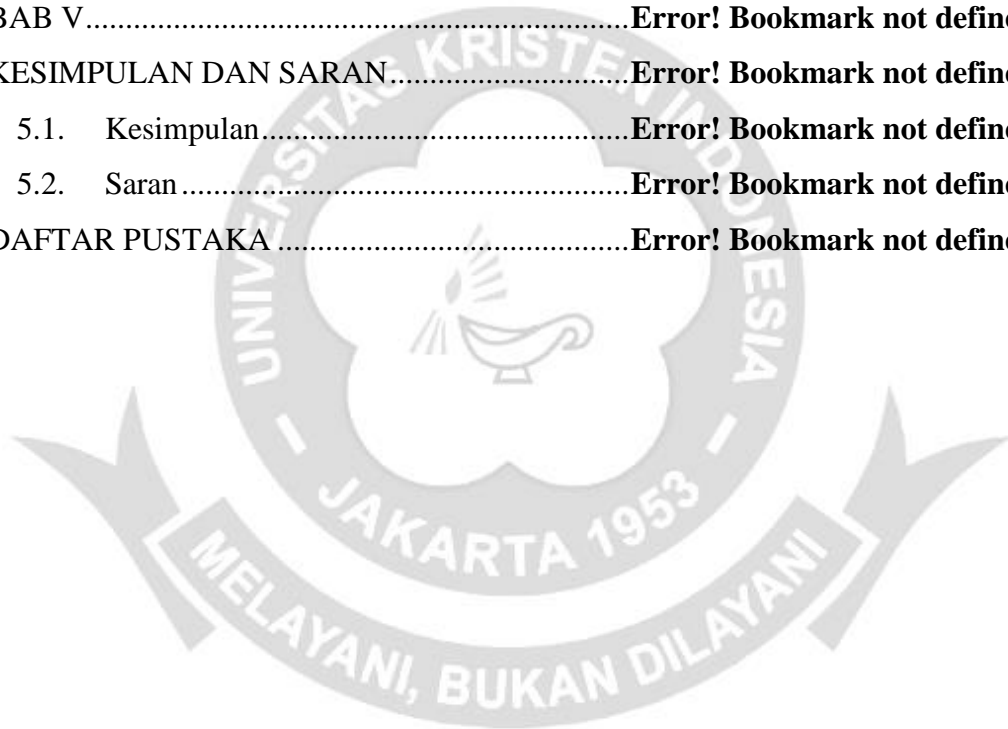


## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Perumusan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.1. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.2. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.3. Sumber Kajian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.5. Metode Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.6. Tahapan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KAJIAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Kerangka Teoritis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1. Partai Politik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2. Demokrasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3. Teori Negara Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.1.4.	Teori <i>Check and Balance</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5.	Teori Kepastian Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.6.	Teori Negara Hukum Pancasila .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.	Kerangka Konsep .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM.....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.	Akibat Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1.	Sanksi Administratif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.	Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik di Masa Mendatang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.	Menjadi partai terlarang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.	Pengurus diberikan sanksi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.	Berdampak Pada Status Wakil Partai di Lembaga Perwakilan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.4.	Adanya Penyitaan Harta Kekayaan Partai Politik.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PARAMETER PARTAI POLITIK DAPAT DIBUBARKAN ..		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.	Pembubaran Partai Politik di Indonesia ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.	Prosedur Pembubaran Partai Politik dari Masa ke Masa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1.	Prosedur Pembubaran Pada Masa Orde Lama	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2.	Prosedur Pembubaran Pada Masa Orde Baru	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3.	Prosedur Pembubaran Pada Masa Reformasi	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.	Parameter Pembubaran Partai Politik di Masa ke Masa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.1.	Parameter Pembubaran Partai Politik Masa Orde Lama.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4.3.2.	Parameter Pembubaran Partai Politik Masa Orde Baru .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.3.	Parameter Pembubaran Partai Politik Masa Reformasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.	Parameter Pembubaran Partai Politik di Masa Mendatang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.1.	Tidak Memenuhi Ketentuan <i>Elektoral Threshold</i> .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.2.	Pembubaran Melalui Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KESIMPULAN DAN SARAN	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.	Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sanksi Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**



## ABSTRAK

Dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini, partai politik merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berkumpul warga negara dan dijamin sebagai hak asasi manusia dalam Konstitusi. Namun, pemerintah dapat membentuk partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menemukan dan memahami implikasi hukum dari pelanggaran hukum suatu pihak, tata cara pemberian sanksi, dan parameter yang dapat digunakan pemerintah untuk membubarkan partai tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa partai politik yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, skorsing, dan pembubaran. Suatu partai politik dapat dibubarkan apabila ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan, atau hasil-hasilnya bertentangan dengan UUD 1945. Partai politik juga dapat dibubarkan jika tidak memenuhi ambang batas pemilu yang diajukan terlebih dahulu oleh pemerintah dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: demokrasi, partai, politik, pembubaran, sanksi

## **ABSTRACT**

*In the current democratic system in Indonesia, political parties are a form of freedom of association and assembly for citizens which are constitutionally guaranteed as human rights. However, the government can disband a political party based on Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This study aims to find out and understand the legal implications of political parties that violate the law as well as the procedures for imposing sanctions, and what parameters can be used by the government to dissolve political parties. The research method used is the normative legal method. The results of the study indicate that political parties that violate the law can be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, suspension, and dissolution. A political party can be dissolved if its ideology, principles, objectives, programs, activities, or consequences are contrary to the 1945 Constitution. A political party can also be dissolved if it does not meet the electoral threshold and is dissolved by the Constitutional Court by first being proposed by the government.*

*Keywords: democracy, party, politics, disbandment, sanction*

